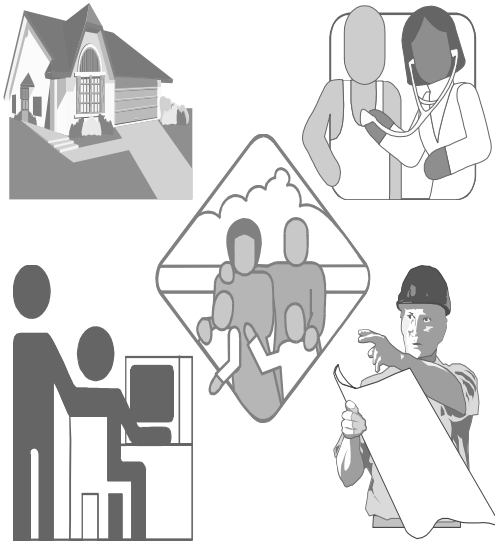




Katalog BPS : 4103.7315

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG TAHUN 2005



Kerjasama

Badan Pusat Statistik dengan BAPPEDA Kabupaten Pinrang

BPS **BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

<http://pinrangkab.bps.go.id>

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2005**

NO. PUBLIKASI : 4103.7315

UKURAN BUKU : 16,5 cm X 21,5 cm

JUMLAH HALAMAN : 50 HALAMAN

NASKAH : SEKSI STATISTIK SOSIAL

PENYUNTING : SEKSI STATISTIK SOSIAL

GAMBAR KULIT : SEKSI STATISTIK SOSIAL

DICETAK OLEH : CV. Karya Mandiri

DITERBITKAN OLEH : BPS KABUPATEN PINRANG
Jl. Andi Isa No. 18 Pinrang

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang tahun 2005 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Selain itu juga diharapkan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya dibidang sosial.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain: indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut secara umum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Pinrang.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan para konsumen data. Saran yang membangun tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih.

Pinrang, Oktober 2006

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG
K e p a l a,**

**PAULUS MANGANDE,SE
NIP. 340013086**



**BADAN PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG**

SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Tahun 2005 yang merupakan hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Pinrang.

Publikasi ini sangat bermanfaat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Selain itu juga diharapkan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Kami berharap agar data Statistik Inkesra yang disajikan dalam publikasi ini dapat terus dikembangkan, sehingga peranannya dapat menjadi petunjuk yang berharga untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.

Semoga Publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pinrang, Oktober 2006

BAPEDA KABUPATEN PINRANG
Ke p a l a,

DRS. H. SYARIFUDDIN SIDE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 010156827

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang tahun 2005 adalah hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Pinrang, disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Selain itu juga diharapkan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain : indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut secara umum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Pinrang.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan para konsumen data. Saran yang membangun tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih.

Pinrang, Oktober 2006

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG
K e p a l a,**

**PAULUS MANGANDE,SE
NIP. 340013086**

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang tahun 2005 adalah hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Pinrang, disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Selain itu juga diharapkan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain : indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut secara umum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Pinrang.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan para konsumen data. Saran yang membangun tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga terwujudnya publikasi ini disampaikan terima kasih.

Pinrang, Oktober 2006

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG
K e p a l a,**

PAULUS MANGANDE,SE
NIP. 340013086



BADAN PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG

SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Tahun 2005 yang merupakan hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Pinrang.

Publikasi ini sangat bermanfaat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Selain itu juga diharapkan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Kami berharap agar data Statistik Inkesra yang disajikan dalam publikasi ini dapat terus dikembangkan, sehingga peranannya dapat menjadi petunjuk yang berharga untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.

Semoga Publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pinrang, Oktober 2006

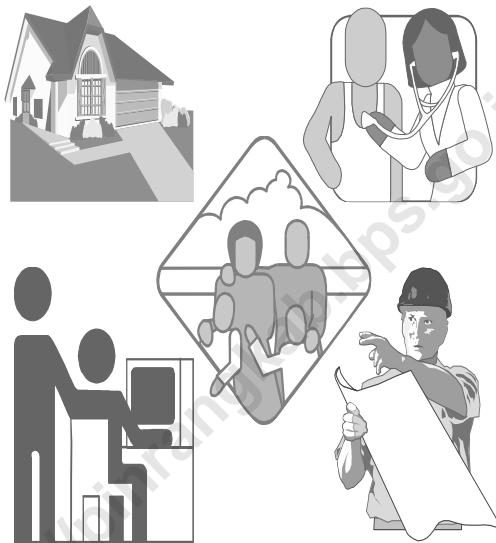
BAPEDA KABUPATEN PINRANG
K e p a l a,

DRS. H. SYARIFUDDIN SIDE, M.Si
NIP. 010156827



Katalog BPS : 4103.7315

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG TAHUN 2005



BPS **BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Konsep dan Definisi.....	2
1.4. Metodologi.....	5
1.5. Ruang lingkup.....	6
BAB II KEPENDUDUKAN	
2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	7
2.2. Komposisi Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	8
2.3. Status Perkawinan.....	10
BAB III FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	
3.1. Usia Perkawinan Pertama.....	12
3.2. Pemakaian Alat/Cara KB.....	13
3.3. Fertilitas.....	15
BAB IV PENDIDIKAN	
4.1. Partisipasi Sekolah.....	16
4.2. Angka Melek Huruf.....	17
4.3. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	18
BAB V KESEHATAN	
5.1. Jenis Keluhan dan Lama Hari Sakit.....	21
5.2. Penolong Persalinan.....	23
5.3. Pemberian Air Susu Ibu.....	25
5.4. Sarana Kesehatan.....	26

BAB VI	KETENAGAKERJAAN	
6.1.	Penduduk Menurut Kegiatan Utama.....	28
6.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	29
6.3.	Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja.....	30
6.4.	Lapangan Pekerjaan Utama.....	32
6.5.	Status Pekerjaan Utama.....	33
6.6.	Jenis Pekerjaan Utama.....	34
6.7.	Jumlah Jam Kerja.....	35
6.8.	Pengangguran.....	
6.8.1.	Pengangguran Terbuka.....	36
6.8.2.	Setengah Pengangguran.....	37
BAB VII	FASILITAS PERUMAHAN	
7.1.	Kualitas Perumahan	
7.1.1.	Luas dan Jenis Lantai.....	38
7.1.2.	Jenis Dinding.....	39
7.1.3.	Jenis Atap.....	40
7.2.	Fasilitas Perumahan	
7.2.1	Sumber Air Minum.....	41
7.2.2.	Sumber Penerangan.....	42
7.2.3.	Tempat Pembuangan Tinja.....	43
7.3.	Status Kepemilikan Rumah	44
BAB VIII	LAIN-LAIN	
8.1.	Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan.....	46
8.2.	Penduduk Miskin.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bangsa bertujuan untuk melakukan suatu proses perubahan dari kondisi Kesejahteraan rakyat yang kurang baik menjadi lebih baik. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tugasnya melakukan kegiatan statistik di berbagai bidang, bertanggung jawab atas tersedianya data secara berkesinambungan guna menopang perencanaan pembangunan, baik sektoral maupun lintas sektoral. Peranan data sangat penting karena data merupakan bahan baku bagi penyusunan statistik/indikator yang digunakan untuk melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.

Kebutuhan data sosial, khususnya mengenai Kesejahteraan Rakyat (Kesra), perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

1.2. Tujuan

Diterbitkannya publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Pinrang adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan data tentang kesejahteraan rakyat dan memberikan gambaran/informasi mengenai perkembangan sosial demografi, sosial budaya, dan sosial ekonomi secara umum yang merupakan dampak dan tujuan dari pembangunan yang selama ini dilaksanakan.

Disamping itu, publikasi ini bisa dipakai sebagai sarana kebijaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang melalui pengidentifikasian faktor yang mungkin dapat dievaluasi.

1.3. Konsep Dan Definisi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan maka sebelum data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu ditentukan batasan terhadap keterangan yang akan dikumpulkan dan batasan tersebut diusahakan baku dan berlaku umum untuk para pemakai data.

Adapun konsep dan definisi tersebut adalah:

Rumah Tangga Biasa

Adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk perkilometer persegi

Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dikali 100

Kawin

Kawin adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Cerai Hidup

Adalah berpisah sebagai suami /istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan.

Cerai Mati

Adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Metode Kontrasepsi

Adalah alat/cara pencegah kehamilan.

Sekolah

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak atau Belum Pernah Sekolah

Adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.

Masih Bersekolah

Adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi.

Tidak Sekolah Lagi

Adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Melek Huruf

Adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batasan usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Keluhan Kesehatan

Adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Penduduk Usia Kerja

Adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas.

Angkatan Kerja

Adalah penduduk usia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.

Bukan Angkatan Kerja

Adalah mereka yang berusia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumahtangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perbandingan antara penduduk usia 10 tahun keatas (usia kerja) dengan angkatan kerja.

Penganggur

Adalah mereka yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Bekerja

Kegiatan melakukan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100.

1.4. Metodologi

a. Sistematika

Penyusunan publikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bagian (bab), tiap bagian dilengkapi dengan tabel dan grafik sehingga pembaca dapat memahami terjadinya suatu perubahan. Bagian utama dari penyusunan publikasi ini adalah : Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana (KB), Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

b. Sumber Data

Sumber data Utama yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005, disamping data hasil Susenas 2002 sebagai pembandingan. Kedua data ini merupakan data primer dalam arti dikumpulkan dan diolah oleh BPS. Selain data primer juga ada data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait.

1.5. Ruang Lingkup

Kesejahteraan seperti diketahui tidak hanya menyangkut segi lahiriah, tetapi juga menyangkut batiniah. Dari segi lahiriah yang terutama berhubungan dengan material seperti pendapatan, konsumsi dan pemilikan barang-barang berharga. Namun aspek material bukanlah satu-satunya kebutuhan manusia untuk mencapai taraf kesejahteraan. Karena terlalu luasnya aspek kesejahteraan, maka data sosial ekonomi seperti pendapatan kurang memadai untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk. Untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan secara utuh perlu dilihat pemenuhan kebutuhan dari segi batiniah yaitu yang bersifat non-material misalnya rasa aman, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Mengingat aspek kesejahteraan yang begitu luas, maka sangatlah tidak mungkin untuk menyajikan seluruh data statistik untuk mengukur tingkat kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu, indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya menyangkut aspek kesejahteraan yang dapat diukur.

BAB II

KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan merupakan salah satu perhatian utama pemerintah baik yang berorientasi langsung terhadap faktor demografi seperti kelahiran, kematian dan mutasi penduduk maupun terhadap kehidupan sosial misalnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, penduduk miskin dan lain sebagainya.

Hal tersebut menjadi perhatian karena penduduk disamping sebagai pelaku pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar dapat menjadi modal pembangunan, namun di pihak lain dengan jumlah penduduk yang besar tanpa didukung oleh kualitas yang memadai justru akan menjadi beban pembangunan.

Untuk itu dalam pembahasan ini akan dibahas berbagai aspek kependudukan seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan Angka Beban Tanggungan dan status perkawinan.

2.1. Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2005 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Pinrang sekitar 335.554 jiwa terdiri dari 163.847 jiwa laki-laki dan 171.707 jiwa perempuan, dengan rasio jenis kelamin sekitar 95,47 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 95 penduduk laki-laki. Penduduk Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 2002-2005 terus bertambah yaitu dari sekitar 313.801 jiwa pada tahun 2002 menjadi 335.554 jiwa pada tahun 2005. Dengan demikian selama kurun waktu tersebut, penduduk Kabupaten Pinrang mengalami pertumbuhan sekitar 2,26 %.

Tabel 2.1.Ciri-Ciri Penduduk Kabupaten Pinrang
Tahun 2005

Rincian	Jumlah
(1)	(2)
1. Banyaknya Penduduk	335.554
- Laki-Laki	163.847
- Perempuan	171.707
2. Rasio Jenis Kelamin	95,42
3. Banyaknya Rumah tangga	80.435
4. Pertumbuhan Penduduk 2002-2005 (%)	2,26
5. Kepadatan per Km ²	171,04

Sumber: Susenas 2002 dan 2005

Menurut jenis kelamin, selama kurun waktu 2002-2005 pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki, dimana laki-laki pertumbuhannya sekitar 1,56 % dan perempuan sekitar 2,94 %. Rendahnya pertumbuhan penduduk laki-laki di Kabupaten Pinrang diduga disebabkan oleh banyaknya penduduk yang bermigrasi keluar kota untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

2.2. Komposisi Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu juga mencerminkan Angka Beban Tanggungan (ABT) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun) dengan umur tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas)

Di Kabupaten Pinrang persentase penduduk yang berusia 0-14 tahun pada tahun 2002 sekitar 32,68 persen turun menjadi sekitar 31,93 persen pada tahun

2005. Turunnya proporsi penduduk usia muda tersebut merupakan indikator bahwa pada kurun waktu 2002-2005 terjadi penurunan tingkat kelahiran sekitar 0,75 persen. Disisi lain proporsi penduduk usia produktif mengalami peningkatan dari sekitar 61,28 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 62,44 persen pada tahun 2005. Meningkatnya proporsi penduduk usia produktif dan turunnya proporsi penduduk usia muda berpengaruh pada turunnya ABT, dari sekitar 63,20 pada tahun 2002 menjadi sekitar 60,15 pada tahun 2005. Dengan demikian pada tahun 2005, tiap 100 penduduk usia produktif secara hipotesis/teori menanggung sekitar 60 penduduk usia tidak produktif.

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005

Kelompok Umur	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	35,52	29,88	32,68	33,55	30,38	31,93
15-64	58,36	64,16	61,28	61,16	63,67	62,44
65+	6,12	5,96	6,04	5,29	5,95	5,63
ABT	71,35	55,84	63,20	63,52	57,06	60,15

Sumber: Susenas 2002 dan 2005

Sedangkan menurut jenis kelamin, selama kurun waktu 2002-2005, ABT penduduk laki-laki sekitar 71,35 pada tahun 2002 turun menjadi sekitar 63,52 pada tahun 2005 dan ABT penduduk perempuan dari sekitar 55,84 pada tahun 2002 naik menjadi sekitar 57,06 pada tahun 2005.

2.3. Status Perkawinan

Status perkawinan dalam publikasi ini dibagi dalam empat kategori yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya dengan proporsi status kawin yang tinggi cenderung akan menaikkan angka kelahiran.

Pada tahun 2005 penduduk Kabupaten Pinrang yang berstatus kawin lebih besar dibanding penduduk yang belum kawin yaitu sekitar 52,63 persen (kawin) dan sekitar 38,28 persen (belum kawin). Sedangkan penduduk Kabupaten Pinrang yang berstatus cerai hidup dan cerai mati persentasenya kecil yaitu sekitar 2,07 persen (cerai hidup) dan sekitar 7,01 persen (cerai mati). Kondisi ini relatif stabil bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2002.

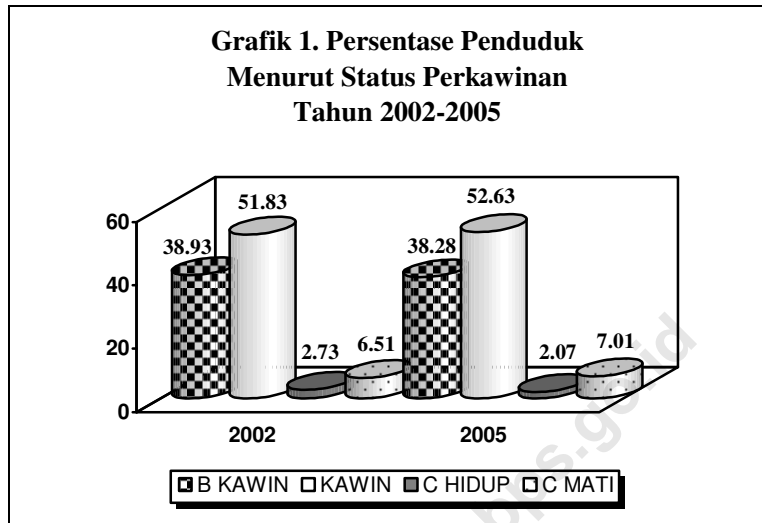
Tabel 2.3. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005

Status Perkawinan	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	43,18	34,95	38,93	43,86	33,06	38,28
Kawin	52,60	51,11	51,83	52,61	52,65	52,63
Cerai Hidup	1,18	3,94	2,73	1,49	2,62	2,07
Cerai Mati	2,55	10,00	6,51	2,05	11,67	7,01

Sumber: Susenas 2002 dan 2005

Menurut jenis kelamin, pada tahun 2005 perceraian (cerai hidup dan cerai mati) perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup (2,62 persen) dan cerai mati (11,67 persen) sedangkan laki-laki sekitar 1,49 persen (cerai hidup) dan sekitar 2,05 persen (cerai mati). Ini menunjukkan adanya perilaku perkawinan yang berbeda antara jenis kelamin, yaitu

laki-laki cenderung perceraian tidak bertahan lama, sebaliknya perempuan ada kecenderungan bertahan lama dalam status janda atau bahkan tidak diikuti oleh perkawinan ulang sama sekali.



BAB III

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam kaitannya dengan kebijaksanaan bidang kependudukan, salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang ditempuh melalui program KB adalah pendewasaan usia perkawinan pertama dan pemakaian alat/cara kontrasepsi, karena kedua faktor ini dianggap langsung dapat mempengaruhi fertilitas (angka kelahiran).

Pendewasaan usia perkawinan pertama dan pembatasan jumlah kelahiran anak diharapkan dapat mempersiapkan keluarga dan anak Indonesia yang berkualitas. Perkawinan pada usia matang (diatas 20 tahun bagi perempuan) menjadikan para wanita lebih siap menjadi ibu dan mengurangi resiko persalinan, disamping itu pembatasan jumlah kelahiran membuat perhatian ibu terhadap anak-anaknya semakin besar.

3.1. Usia Perkawinan Pertama

Tabel 3.1. Persentase Wanita Usia 10 Tahun Keatas Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2003 dan 2005

Umur Perkawinan Pertama	2003	2005
(1)	(2)	(3)
≤16	19,10	23,95
17-18	29,01	26,87
19-24	44,20	37,45
25+	7,69	11,73

Sumber: Susenas 2003 dan 2005

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi umur perkawinan, khususnya wanita menyebabkan masa reproduksinya lebih pendek

Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih besar.

Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005, wanita pernah kawin usia 10 tahun keatas menurut usia perkawinan pertama paling banyak pada kelompok umur 19-24 tahun yaitu sekitar 37,45 persen. Dibandingkan tahun 2003 terjadi penurunan sekitar 6,75 persen poin. Sementara perkawinan pada usia muda (dibawah 16 tahun) mengalami peningkatan yaitu dari sekitar 19,10 persen pada tahun 2003 menjadi sekitar 23,95 persen pada tahun 2005. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai resiko persalinan masih rendah. Perkawinan yang dilakukan pada usia matang (diatas 20 tahun) bagi perempuan akan membantu mereka menjadi lebih siap untuk menjadi ibu dan mengurangi resiko persalinan.

3.2. Pemakaian Alat/Cara KB

Selain pendewasaan usia perkawinan pertama cara lain yang digunakan untuk menjarangkan kelahiran adalah dengan mensukseskan program KB. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan pemakaian alat/cara kontrasepsi KB.

Di Kabupaten Pinrang, persentase wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin atau yang biasa disebut Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB yaitu sekitar 43,39 persen pada tahun 2002, turun menjadi sekitar 39,09 persen pada tahun 2005.

Tabel 3.2.1 Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB Wanita Umur 15-49 Tahun Tahun 2002 dan 2005

Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB	2002	2005
(1)	(2)	(3)
Sedang Pakai	43,39	39,09
Pernah Pakai	19,45	18,28
Tidak Pernah Pakai	37,16	42,63

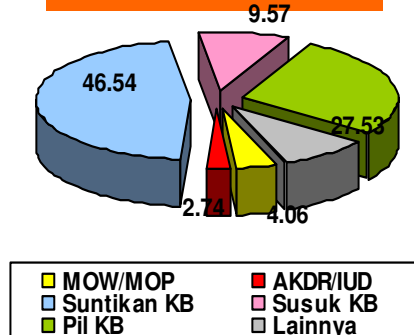
Sumber : Susenas 2002 dan 2005

Jika dirinci menurut jenis alat/cara KB yang dipakai tampak bahwa ada kecenderungan para akseptor lebih suka untuk menggunakan Suntikan KB yaitu sekitar 24,91persen pada tahun 2002 dan meningkat menjadi sekitar 46,54 persen pada tahun 2005. Banyaknya akseptor yang menggunakan Suntikan KB bisa disebabkan karena alat/cara ini relatif mudah pemakaiannya, begitu juga dalam hal pemberhentian bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor. Disamping itu pula alat/cara ini relatif lebih gampang didapatkan.

Tabel 3.2.2. Akseptor KB menurut Jenis Alat/Cara KB Yang Digunakan, Tahun 2002 dan 2005

Jenis Kontrasepsi	2002	2005
(1)	(2)	(3)
MOW/MOP	1,84	4,06
AKDR/IUD	1,84	2,74
Suntikan KB	24,91	46,54
Susuk KB	4,33	9,57
Pil KB	65,67	27,53
Lainnya	1,41	9,57

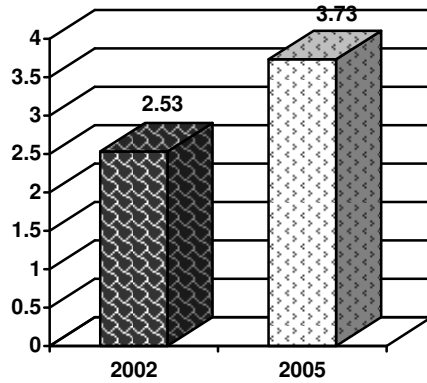
Akseptor KB menurut Jenis Alat/Cara KB Yang Digunakan, Tahun 2005



3.3. Fertilitas

Fertilitas merupakan komponen demografi yang bersifat menambah jumlah penduduk secara alami. Jika tingkat fertilitas tidak bisa dikendalikan maka ledakan jumlah penduduk akan terjadi yang pada gilirannya hal ini akan menimbulkan berbagai masalah kependudukan.

**Grafik 3. Angka Kelahiran Total (TFR)
Tahun 2005**



Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas tahun 2002 dan 2005, Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya kenaikan selama kurun waktu 2002-2005 yaitu dari sekitar 2,53 pada tahun 2002 menjadi sekitar 3,73 pada tahun 2005

BAB IV

PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya, karena meningkatnya pendidikan penduduk berarti kualitas manusia sebagai sumber daya semakin baik, yang pada akhirnya akan meningkat pula produktivitas dalam semua sektor pembangunan.

Oleh karena itu pemerintah terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan berbagai paket seperti program wajib belajar, pendidikan luar sekolah, sekolah terbuka dan lain sebagainya. Program pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah, menurunkan angka buta huruf, serta meningkatkan jenjang pendidikan penduduk.

4.1. Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah partisipasi penduduk usia tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SD (7-12 tahun) pada tahun 2002 sekitar 94,18 persen turun menjadi sekitar 93,33 persen pada tahun 2005. Ini berarti terdapat 93,33 persen penduduk usia SD yang masih bersekolah. Pada usia SLTP (13-15 tahun) juga mengalami penurunan dari sekitar 72,66 persen pada tahun 2002 turun menjadi sekitar 68,30 persen pada tahun 2005. Dan untuk usia SLTA (16-18 tahun), pada tahun 2002 sekitar 37,92 persen naik menjadi sekitar 49,50, persen pada tahun 2005 demikian juga usia Perguruan Tinggi (19-24 tahun) naik dari sekitar 3,64 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 8,38 persen pada tahun 2005. Akan tetapi penurunan APS seiring dengan semakin tingginya

kelompok umur memberi gambaran adanya pertimbangan sebagian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini karena selain pertimbangan tingginya biaya, juga kebutuhan rumah tangga semakin meningkat sehingga anaknya cenderung diikutkan dalam kegiatan bekerja atau mencari kerja.

Tabel 4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah (7-24 tahun) Tahun 2002 dan 2005

KelompokUmur /JenisKelamin	2002	2005
(1)	(2)	(3)
7-12	94,18	93,33
Laki-laki	94,31	90,07
Perempuan	94,04	97,11
13-15	72,66	68,95
Laki-laki	71,66	68,30
Perempuan	73,64	69,81
16-18	37,92	49,50
Laki-laki	34,56	49,46
Perempuan	41,99	49,53
19-24	3,64	8,38
Laki-laki	2,67	8,54
Perempuan	4,55	8,24

Sumber : Susenas 2002, 2005

Menurut jenis kelamin pada tahun 2005 APS perempuan pada usia SD dan SLTP lebih tinggi daripada laki-laki. Demikian juga pada usia SLTA pada tahun 2005 APS perempuan lebih tinggi daripada APS laki-laki. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak perempuan sampai jenjang pendidikan SLTA keatas sudah baik. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tanpa melihat

perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan .Dengan demikian mengurangi persepsi masyarakat terhadap perempuan yaitu kegiatan kerumahtangaan yang dianggap tidak membutuhkan pendidikan tinggi.

4.2. Angka Melek Huruf

Seseorang dikatakan melek huruf jika mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf

Arab, Bugis, Makassar, Jawa, Cina dan sebagainya. Kalau seseorang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Hasil Susenas 2005 di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun keatas sekitar 88,51. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan bila dibanding tahun 2002 yaitu sekitar 87,93.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2002	91,27	84,82	87,93
2005	91,75	85,49	88,51

Sumber : Susenas 2002, 2005

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2002 selisih AMH laki-laki dan perempuan sekitar 6,45 poin sedangkan pada tahun 2005 sekitar 6,26 poin. Adanya penurunan selisih AMH laki-laki dan perempuan menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tanpa melihat status jenis kelamin.

4.3. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Di Kabupaten Pinrang, persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD menunjukkan penurunan dari sekitar 38,92 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 36,19 persen pada tahun 2005. Penduduk yang tamat SD juga mengalami penurunan dari sekitar 34,28 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 31,14 persen pada tahun 2005. Sedangkan peningkatan justru terjadi pada

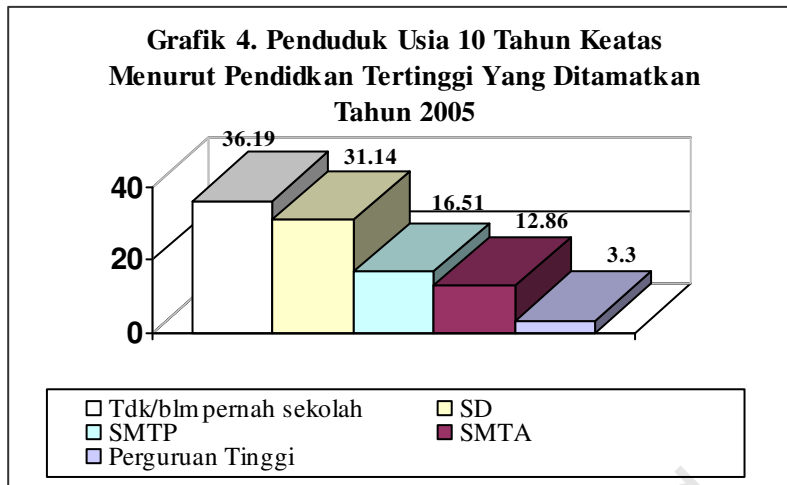
penduduk yang tamat SMTP yaitu dari sekitar 13,49 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 16,51 persen pada tahun 2005 dan tamat SMTA keatas yaitu dari sekitar 13,30 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 16,16 persen pada tahun 2005

**Tabel 4.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas
Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Tahun 2002 dan 2005**

Tingkat Pendidikan	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-Tdk/blm pernah sekolah/ Tdk Tamat SD	35,58	42,04	38,92	33,50	38,70	36,19
- SD	35,08	33,54	34,28	32,00	30,34	31,14
- SMTP	14,52	12,54	13,49	17,40	15,68	16,51
- SMTA	11,51	9,43	10,43	13,17	12,58	12,86
- D1, D2,	1,02	0,51	0,75	1,02	1,05	1,03
- D3/Sarjana Muda	0,73	0,32	0,52	0,09	0,44	0,27
- D4, S1, S2, S3	1,58	1,62	1,60	2,81	1,67	2,00

Sumber : Susenas 2002, 2005

Berdasarkan jenis kelamin, terjadi peningkatan tingkat pendidikan yang ditamatkan baik pada penduduk perempuan maupun laki-laki dari tahun 2002 terhadap tahun 2005 yaitu pada tingkat pendidikan tamat SMTP dan SMTA dan tamat SMTA keatas.



BAB V

KESEHATAN

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat terwujud derajat kesehatan penduduk yang optimal. Untuk mencapai tujuan ini perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat menunjang upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara mudah, murah dan merata.

Beberapa indikator kesejahteraan bidang kesehatan akan disajikan dalam bab ini, antara lain jenis keluhan dan lama hari sakit, penolong persalinan, pemberian ASI dan sarana/prasarana kesehatan.

5.1. Jenis Keluhan dan Lama Hari Sakit.

Tabel 5.1. Persentase Penduduk Menurut Lamanya Sakit Sebulan Yang Lalu Tahun 2002 dan 2005

Lama Sakit (hari)	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<4	38,63	49,94	44,10	52,07	49,74	50,96
4-7	41,76	32,10	40,93	32,96	27,00	30,11
8-14	6,27	3,64	7,90	5,34	8,46	6,83
15-21	1,81	3,05	2,66	2,90	5,30	4,04
22-30	11,54	11,27	4,34	6,74	9,50	8,06

Sumber : Susenas 2002, 2005

Lama hari sakit dihitung menurut lama mengalami keluhan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau

kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminalitas atau lainnya.

Keluhan kesehatan yang banyak diderita oleh penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 adalah panas (10,39 persen) kemudian berturut-turut pilek (7,27 persen), batuk (6,64 persen), sakit kepala (5,85 persen), asma/sesak napas (1,63 persen), diare (1,56 persen) dan sakit gigi (1,13 persen). Dibandingkan dengan keadaan tahun 2002 terjadi peningkatan pada hampir semua jenis keluhan kesehatan.

Berdasarkan lama hari sakit, dari semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang paling banyak adalah mereka yang mengalami keluhan selama kurang dari 4 hari yaitu sekitar 50,96 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2002, mengalami peningkatan yaitu sekitar 6,86 persen poin. Peningkatan juga terjadi untuk lama hari sakit 15-21 dan 22-30 hari yaitu dari sekitar 2,66 dan 4,34 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 4,04 dan 8,06 persen pada tahun 2005. Sedangkan penurunan terjadi pada lama hari sakit 4-14 hari.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Menurut Jenis Keluhan Kesehatan Tahun 2002 dan 2005

Keluhan Kesehatan	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Panas	5,32	4,15	4,74	10,85	9,95	10,39
- Batuk	4,70	4,05	4,37	7,01	6,28	6,64
- Pilek	5,75	3,81	4,77	7,45	7,10	7,27
- Asma/Sesak Nafas	2,28	1,90	2,08	1,74	1,52	1,63
- Diare	0,71	0,42	0,56	1,59	1,52	1,56
- Sakit Kepala	2,02	4,00	3,01	4,44	7,19	5,85
- Sakit Gigi	1,37	1,08	1,22	1,02	1,24	1,13
- Lainnya	6,22	5,21	5,71	7,39	8,97	8,20

Sumber : Susenas 2002, 2005

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2005 lama hari sakit laki-laki lebih lama daripada perempuan. Ini bisa dilihat dari lama hari sakit kurang dari 4 hari untuk perempuan sekitar 49,74 persen, sedangkan laki-laki sekitar 52,07 persen. Bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2002, pada laki-laki terjadi peningkatan lama hari sakit kurang dari 4 hari. Sedangkan pada wanita peningkatan terjadi pada lama hari sakit kurang dari 7 hari.

5.2. Penolong Persalinan

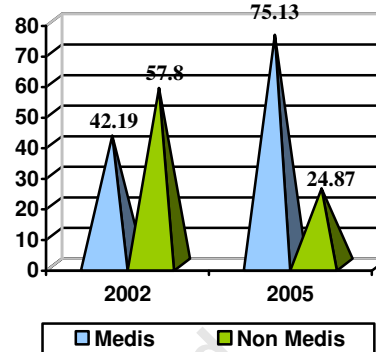
Salah satu indikator kesehatan yang erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan ibu dan pelayanan kesehatan adalah penolong persalinan oleh tenaga profesional dan terlatih, seperti dokter dan bidan karena diharapkan dengan semakin profesionalnya tenaga penolong persalinan, maka dapat mengatasi persalinan yang beresiko tinggi. Persalinan oleh tenaga dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada tenaga dukun atau lainnya karena mereka telah mendapat pengetahuan dan pengalaman yang cukup melalui pendidikan formal.

Tabel 5.2 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Tahun 2002 dan 2005

Penolong Persalinan	2002	2005
(1)	(2)	(3)
Medis	42,19	75,13
- Dokter	3,98	2,71
- Bidan	37,06	72,42
- Lainnya	1,15	-
Non Medis	57,80	24,87
- Dukun	49,76	10,46
- Famili	7,21	14,07
- Lainnya	0,83	0,34

Sumber : Susenas 2002, 2005

Grafik 5. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Tahun 2002 dan 2005



Data Susenas 2005 menunjukkan bahwa tenaga bidan merupakan penolong persalinan yang paling banyak yaitu sekitar 72,42 persen dari jumlah balita yang lahir. Jika dibanding tahun 2002, menunjukkan adanya peningkatan persentase penolong persalinan oleh tenaga medis (Dokter, Bidan dan tenaga medis lainnya) yaitu dari sekitar 42,19 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 75,13 persen pada tahun 2005. Demikian juga penolong persalinan untuk tenaga non medis (Dukun, Famili dan lainnya) menunjukkan penurunan dari sekitar 57,80 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 24,87 persen pada tahun 2005. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya tenaga penolong persalinan dengan dukun yaitu dari sekitar 49,76 persen pada tahun 2002 turun menjadi sekitar 10,46 persen pada tahun 2005.

5.3. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

ASI merupakan zat makanan yang mengandung gizi lengkap yang sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pemberian ASI kepada bayi akan memenuhi kebutuhan gizi dan memberi kekebalan terhadap beberapa penyakit, sebab selain bergizi, ASI juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh.

**Tabel 5.3 Persentase Balita Menurut Lamanya Disusui
Tahun 2002-2005**

Lama Disusui (bulan)	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	4,85	1,08	3,31	-	-	-
1-5	13,76	15,99	14,67	1,28	-	0,61
6-11	11,53	16,57	13,59	3,74	4,53	4,15
12-17	38,18	37,95	38,09	27,46	26,11	26,75
18-23	13,59	13,26	13,45	35,06	29,48	32,13
24+	18,09	15,16	16,90	32,47	39,89	36,36

Sumber : Susenas 2002, 2005

Oleh karena itu pemerintah menganjurkan agar para ibu memberikan ASI kepada bayinya selama 24 bulan (2 tahun).

Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005, paling banyak bayi diberi ASI selama 24 bulan keatas yaitu sekitar 36,36 persen. Secara umum ada peningkatan lama pemberian ASI pada bayi. Hal ini nampak dari persentase bayi yang disusui selama 17 bulan keatas meningkat dari sekitar 68,44 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 95,24 persen pada tahun 2005. Sehingga persentase bayi yang disusui kurang dari 17 bulan mengalami penurunan dari sekitar 31,07 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 4,76 persen pada tahun 2005. Adanya penurunan lama pemberian ASI tersebut kemungkinan disebabkan diantaranya: kualitas makanan

ibu sehingga tidak tersedia ASI yang cukup, kesehatan ibu dan kesibukan ibu yang berkaitan dengan profesinya.

5.4. Sarana Kesehatan

Tabel 5.4.1 Banyaknya Sarana Kesehatan Tahun 2005

Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
1. Rumah Sakit	1
2. Rumah Bersalin	3
3. Puskesmas	12
4. Puskesmas Pembantu	53
5. Posyandu	338
6. Klinik KB Program	29
7. Klinik KB Non Program	18

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pinrang 2005

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya sarana tersebut maka setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapat pelayanan

kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai kemampuan yang ada.

Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 sarana kesehatan yang tersedia adalah Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik KB Program, Klinik KB Non Program dan Posyandu. Jumlah rumah sakit ada 1 (satu) buah dengan kapasitas tempat tidur 83, sedangkan Rumah Bersalin sebanyak 3 (tiga) buah semuanya adalah milik swasta.

Tabel 5.4.2 Banyaknya Puskesmas dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2005

Kecamatan	Banyaknya	
	Puskesmas	Pustu
(1)	(2)	(3)
Suppa	1	8
Mattiro Sompe	1	4
Lanrisang	1	4
Mattiro Bulu	1	4
Watang Sawitto	1	1
Paleteang	-	1
Tiroang	1	4
Patampanua	1	5
Cempa	1	5
Duampanua	2	7
Batulappa	1	1
Lembang	1	9
Jumlah	12	53

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang 2005

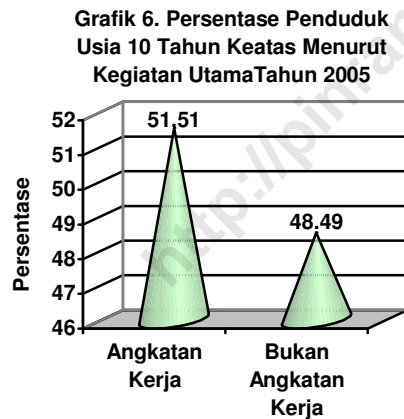
BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan jumlah angkatan kerja meningkat. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Oleh karena itu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang terjadi setiap tahun.

6.1. Penduduk Menurut Kegiatan Utama

Kegiatan penduduk usia 10 tahun keatas digolongkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan, sedang yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya.



Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005, penduduk usia 10 tahun keatas yang termasuk dalam usia kerja terdiri sekitar 51,51 persen angkatan kerja dan sekitar 48,49 persen bukan angkatan kerja. Sementara itu, pertumbuhan angkatan kerja selama periode 2002-2005 sekitar 5,68 persen per tahun, lebih tinggi daripada laju

pertumbuhan penduduk yaitu 2,26 persen per tahun. Oleh karena itu diperlukan daya dukung penyediaan kesempatan/lapangan kerja yang mencukupi.

Tabel 6.1. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pinrang Tahun 2002 dan 2005

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Penduduk
	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2002	86.793	28.345	115.138	313.801
2005	95.718	40.194	135.912	335.545
Pertumbuhan (2002-2005) % per tahun	3,32	12,35	5,68	2,26

Sumber : Susenas 2002, 2005

Menurut jenis kelamin, terjadi pertumbuhan yang tinggi pada angkatan kerja perempuan yaitu sekitar 12,35 persen, sedangkan laki-laki sekitar 3,32 persen per tahun. Pertumbuhan yang tinggi pada angkatan kerja perempuan mungkin disebabkan karena tuntutan ekonomi keluarga yang semakin besar sehingga mendorong wanita turut bekerja mencari nafkah.

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (10 tahun keatas). TPAK adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 6.2 Penduduk Usia Kerja 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005

Jenis Kegiatan Utama	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Bekerja	69,40	19,99	43,85	68,01	20,03	43,23
- Mencari kerja	2,27	1,87	2,07	7,02	9,46	8,28
- Sekolah	19,17	18,22	18,68	19,22	15,94	17,52
- Mengurus RT	0,83	54,01	28,38	0,74	48,92	25,62
- Lainnya	8,34	5,81	7,03	5,02	5,65	5,34
TPAK	71,67	21,86	45,92	75,03	29,49	51,51

Sumber : Susenas 2002, 2005

Menurut data Susenas, TPAK di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 mencapai sekitar 51,51 persen yang berarti pada setiap 100 penduduk usia kerja sekitar 52 diantaranya termasuk angkatan kerja. Bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2002 yaitu sekitar 45,92 menunjukkan adanya peningkatan.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, dimana TPAK laki-laki berkisar antara 70-80 sedangkan TPAK perempuan berkisar antara 20-30. Salah satu sebab tingginya TPAK laki-laki dibanding perempuan karena laki-laki kebanyakan adalah bekerja yaitu sekitar 68,01 persen sedangkan wanita kebanyakan adalah mengurus rumah tangga yaitu sekitar 48,92 persen.

6.3. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja

Kualitas angkatan kerja dapat diukur diantaranya melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan. Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 tingkat

pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja tergolong masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah (Tamat SD kebawah) mencapai sekitar 67,33 persen. Sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan menengah (SLTP dan SLTA) dan tinggi (Akademi dan Universitas) masing-masing sekitar 29,37 persen dan 3,30 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2002 menunjukkan adanya penurunan yaitu angkatan kerja yang berpendidikan rendah sekitar 5,87 . Sedangkan yang berpendidikan menengah dan tinggi menunjukkan peningkatan yaitu sekitar 5,45 persen poin dan 0,43 persen poin.

Tabel 6.3 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2002 dan 2005

Tingkat Pendidikan	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Rendah	70,65	75,58	73,20	65,50	69,04	67,33
- Menengah	26,02	21,96	23,92	30,57	28,25	29,37
- Tinggi	3,33	2,45	2,87	3,92	2,71	3,30

Sumber : Susenas 2002, 2005

Catatan : Rendah : Tamat SD ke bawah
 Menengah : SLTP, SLTA
 Tinggi : Akademi/Universitas

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan angkatan kerja laki-laki menunjukkan adanya peningkatan pada tingkat pendidikan menengah yaitu dari sekitar 26,02 persen menjadi sekitar 30,57 persen. Demikian juga pada angkatan kerja perempuan menunjukkan peningkatan pada tingkat pendidikan Menengah yaitu dari sekitar 21,96 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 28,25 persen pada

tahun 2005 dan tingkat pendidikan Tinggi yaitu dari sekitar 2,45 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 2,71 persen pada tahun 2005.

6.4. Lapangan Pekerjaan Utama

Tabel 6.4 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2002 dan 2005

Lapangan Pekerjaan Utama	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Pertanian	74,78	40,48	66,70	72,18	53,21	67,64
- Pertambangan & Penggalian	0,15	-	0,11	0,27	-	0,21
- Industri	2,62	3,41	2,81	2,06	1,30	1,88
- Listrik, Gas & Air	0,15	-	0,11	0,14	-	0,11
- Konstruksi	2,56	0,48	2,07	2,49	0,43	1,99
- Perdagangan	7,11	33,86	13,42	7,59	27,14	12,27
- Angkutan & Komunikasi	4,36	-	3,33	4,53	0,43	3,55
- Keuangan	0,15	-	0,11	0,55	0,88	0,63
- Jasa	8,13	21,77	11,34	10,19	15,73	11,51
- Lainnya	-	-	-	-	0,89	0,21

Sumber : Susenas 2002, 2005

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah andalan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai penghasil beras dan hasil bumi lainnya. Oleh sebab itu sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Susenas 2005, banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian sekitar 67,64 persen mengalami peningkatan dibanding tahun 2002 yaitu sekitar 66,70 persen. Sedangkan sektor industri mengalami penurunan dari sekitar 2,81 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 1,88 persen pada tahun 2005. Selain

sektor pertanian, sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2005 penduduk yang bekerja di sektor perdagangan sekitar 12,27 persen dan di sektor jasa sekitar 11,51 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2002 mengalami penurunan sekitar 1,15 persen poin untuk sektor perdagangan dan untuk sektor jasa mengalami peningkatan sekitar 0,17 persen poin .

Menurut jenis kelamin, laki-laki dominan bekerja di sektor pertanian yaitu sekitar 72,18 persen sementara perempuan dominan di sektor pertanian, perdagangan dan jasa yaitu sekitar 53,21 persen untuk pertanian, 27,14 persen untuk perdagangan dan 15,73 persen untuk jasa. Sedangkan untuk sektor lainnya menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu mencolok.

6.5. Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Berusaha sendiri	32,56	27,04	31,26	38,87	22,20	33,36
- Berusaha dibantu buruh tdk tetap/tdk dibayar	30,86	15,99	27,36	24,27	16,68	22,22
- Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2,96	1,45	2,60	3,30	-	2,51
- Buruh/karyawan/pegawai	15,80	26,51	18,33	16,60	23,96	18,36
- Pekerja bebas di pertanian	1,42	5,31	2,33	3,54	5,19	3,93
- Pekerja bebas di non pertanian	0,26	-	0,20	0,28	0,43	0,31
- Pekerja tidak dibayar	16,13	23,71	17,91	15,15	32,54	19,31

Sumber : Susenas 2001, 2004

Hasil Susenas 2005 menunjukkan bahwa penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja di Kabupaten Pinrang dengan status berusaha sendiri proporsinya paling besar dibanding dengan status pekerjaan yang lain, dimana pekerja yang berusaha sendiri sekitar 33,36 persen. Demikian juga pada tahun 2002 proporsi paling besar adalah dengan status berusaha sendiri yaitu sekitar 31,26 persen.

Penduduk laki-laki paling banyak status pekerjaan utama adalah berusaha sendiri yaitu sekitar 38,87 persen pada tahun 2005 demikian juga pada tahun 2002 sekitar 32,56 persen. Sedangkan perempuan paling banyak adalah pekerja tidak dibayar yaitu sekitar 32,54 persen pada tahun 2005 dan pada tahun 2002 hanya sekitar 23,71 persen .

6.6 Jenis Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Tenaga profesional, kepemimpinan, Tata Usaha	6,05	17,06	8,64	7,42	15,71	9,41
- Tenaga usaha pertanian	74,37	39,74	66,21	72,04	52,78	67,43
- Tenaga penjualan & jasa	8,04	36,42	14,73	9,25	29,34	14,05
- Tenaga lainnya (Tenaga produksi, operator, pekerja kasar dan lainnya)	11,54	6,79	10,41	10,33	2,17	8,38

Sumber : Susenas 2002, 2005

Kebanyakan penduduk Kabupaten Pinrang berprofesi sebagai petani atau tenaga usaha pertanian. Pada tahun 2005 penduduk yang berprofesi sebagai tenaga

usaha pertanian sekitar 67,43 persen, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2002 yaitu sekitar 66,21 persen. Sedangkan profesi tenaga lainnya (tenaga produksi, operator, pekerja kasar dan lainnya) dan tenaga penjualan dan jasa justru mengalami penurunan yaitu sekitar 10,41 dan 14,73 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 8,38 dan 14,05 persen pada tahun 2005.

Menurut jenis kelamin, perempuan yang berprofesi sebagai tenaga usaha pertanian menunjukkan adanya peningkatan yaitu sekitar 13,04. persen poin sedang untuk laki-laki turun sekitar 2,33 persen poin. Profesi tenaga penjualan dan jasa dan tenaga profesional, kepemimpinan, tata usaha untuk laki-laki mengalami peningkatan dari sekitar 8,04 dan 6,05 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 9,25 dan 7,42 persen pada tahun 2005. Sedangkan perempuan justru mengalami penurunan dari sekitar 17,06 dan 36,42 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 15,71 dan 29,34 persen pada tahun 2005.

6.7. Jumlah Jam Kerja

Penduduk yang bekerja penuh (full employed) atau bekerja sesuai jam kerja normal adalah penduduk yang jumlah jam kerjanya mencapai 35 jam atau lebih selama seminggu. Berdasarkan hasil Susenas 2002, persentase penduduk 10 tahun keatas yang bekerja penuh sekitar 48,51 persen mengalami penurunan menjadi sekitar 42,24 persen pada tahun 2005. Sementara itu penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal mengalami peningkatan dari sekitar 51,50 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 57,77 persen pada tahun 2005. Menurut jenis kelamin, pada tahun 2005 dan 2002 baik laki-laki maupun perempuan kebanyakan bekerja dibawah jam kerja normal.

Tabel 6.7. Persentase penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Jam Kerja Tahun 2002 dan 2005

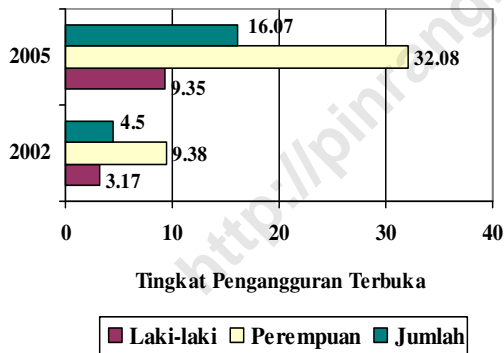
Jam Kerja	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 35 Jam	50,29	55,39	51,50	54,91	66,79	57,77
0	4,47	8,94	5,53	2,87	9,11	4,37
1-9	1,01	2,19	1,29	4,64	6,07	4,99
10-24	16,19	25,52	18,39	26,84	30,33	27,68
25-34	28,62	18,74	26,29	20,56	21,28	20,73
≥ 35 Jam	49,71	44,61	48,51	45,08	33,21	42,24
35-44	26,73	21,73	25,55	22,24	16,16	20,78
45-59	7,00	6,08	6,78	17,44	11,75	16,08
60+	15,98	16,80	16,18	5,40	5,30	5,38

Sumber : Susenas 2002, 2005

6.8. Pengangguran

6.8.1 Pengangguran Terbuka

Grafik 7. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005



Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Pada tahun 2002 TPT Kabupaten Pinrang sekitar

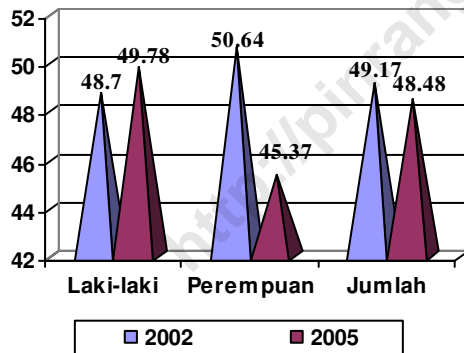
4,50 persen mengalami peningkatan menjadi sekitar 16,07 persen pada tahun 2005.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan mayoritas adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja sedangkan laki-laki mayoritas bekerja karena pencari nafkah dalam keluarga.

6.8.2. Setengah Pengangguran

Penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal disebut setengah pengangguran kentara. Sedangkan Angka Setengah Pengangguran (ASP) adalah perbandingan penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal dengan angkatan kerja. Pada tahun 2005 ASP di Kabupaten Pinrang sekitar 48,48 artinya diantara seratus angkatan kerja terdapat sekitar 48 orang yang bekerja kurang dari 35 jam. Angka ini menunjukkan adanya penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2002 yaitu sekitar 49,17.

Grafik 8. Angka Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005



Menurut jenis kelamin, pada tahun 2002 ASP laki-laki adalah 49, lebih rendah daripada perempuan (51). Sedangkan pada tahun 2005 ASP laki-laki (50) justru lebih tinggi daripada perempuan (45).

BAB VII

FASILITAS PERUMAHAN

Perumahan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia disamping sandang dan pangan. Dalam skala yang sederhana perumahan bukan hanya mengandung arti sebagai tempat tinggal, tetapi juga merupakan satuan kompleks yang melibatkan berbagai unsur kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, agama dan sebagainya.

Rumah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan di bidang perumahan. Keberadaan rumah yang dimaksud tidak saja menyangkut kuantitas, tetapi juga mengenai kualitas rumah. Secara umum kualitas rumah tinggal dapat dilihat dari bahan bangunan yang digunakan dan keadaan fasilitas rumah tersebut sehingga membuat rumah yang sehat. Di dalam bab ini akan disajikan beberapa aspek mendasar dari rumah yang berkaitan dengan kualitas perumahan dan fasilitas perumahan tersebut.

7.1 Kualitas Perumahan

Salah satu kondisi tingkat kesejahteraan rumahtangga dapat dilihat dari kualitas perumahannya, seperti luas lantai dan jenis lantai, jenis dinding dan jenis atap yang digunakan. Semakin baik kualitas perumahan menunjukkan semakin baik taraf hidup rumahtangga

7.1.1 Luas dan Jenis Lantai.

Pada tahun 2002 secara umum rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi sekitar 47,15 persen. Yang menempati rumah dengan luas lantai diatas 100 meter persegi sekitar 10,52 persen.

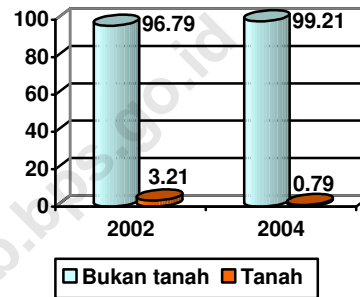
Jika dibanding tahun 2002 terjadi penurunan rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi dan peningkatan rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai diatas 100 meter persegi. Pada tahun 2005 rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi sekitar 45,71 persen dan yang menempati rumah dengan luas lantai diatas 100 meter persegi sekitar 13,11 persen.

Tabel 7.1.1 Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Tahun 2002 dan 2005

Luas Lantai	2002	2005
(1)	(2)	(3)
<20	4,11	2,66
20-49	43,04	43,05
50-99	42,32	41,18
100-149	6,13	8,98
150+	4,39	4,13

Sumber : Susenas 2002,2005

Grafik 9. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Lantai Tahun 2002 dan 2004



Selain luas lantai yang digunakan perlu juga memperhatikan jenis lantainya. Data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2002, sekitar 96,79 persen rumahtangga menggunakan lantai bukan tanah. Kemudian pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi 99,21 persen rumahtangga. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kondisi perumahan di Kabupaten Pinrang.

7.1.2. Jenis Dinding

Jika dilihat dari jenis dinding yang digunakan, kebanyakan rumahtangga menggunakan jenis dinding dari kayu yaitu sekitar 44,36 persen pada tahun 2002 turun menjadi sekitar 43,90 persen pada tahun 2004.

Tabel 7.2 Persentase Rumah tangga Menurut Jenis Dinding Terbanyak Tahun 2002 dan 2004

Jenis Dinding	2002	2004
(1)	(2)	(3)
- Tembok	18,31	21,51
- Kayu	44,36	43,90
- Bambu	31,80	28,99
- Lainnya	5,54	5,61

Sumber : Susenas 2002,2004

Sedangkan jenis dinding bambu mengalami penurunan dari sekitar 31,80 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 28,99 persen pada tahun 2004. Untuk jenis dinding tembok mengalami peningkatan dari sekitar 18,31 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 21,51 persen pada tahun 2004.

7.1.3. Jenis Atap

Kualitas rumah dilihat dari jenis atap pada tahun 2004 mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2002. Hal ini dapat dilihat dari persentase rumah tangga yang menggunakan atap tidak layak pakai yaitu ijuk/rumbia mengalami penurunan dari sekitar 4,58 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 1,09 persen pada tahun 2004.

Sementara atap layak pakai mengalami peningkatan. Atap layak pakai adalah atap selain dari atap daun-daunan.

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terbanyak Tahun 2002 dan 2004

Jenis Atap Terluas	2002	2004
(1)	(2)	(3)
- Beton	1,44	0,79
- Genteng	0,31	0,78
- Sirap	0,85	0,16
- Seng	90,42	96,23
- Asbes	1,02	0,80
- Ijuk/Rumbia	4,58	1,09
- Lainnya	1,37	0,16

Sumber : Susenas 2002,2004

7.2. Fasilitas Perumahan

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal.

Fasilitas pokok yang terpenting agar rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

7.2.1. Sumber Air Minum

Air merupakan kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi manusia terutama untuk minum, sehingga diperlukan adanya air bersih demi menjaga kebersihan maupun kesehatan. Air bersih disini adalah air yang benar-benar bebas dari berbagai kuman penyakit.

Sumber Air Minum	2002	2005
(1)	(2)	(3)
- Leding	9,73	10,53
- Pompa	20,66	21,12
- Sumur	63,30	58,24
- Mata air	1,88	9,48
- Air sungai	4,44	0,16
- Lainnya	-	0,47

Sumber : Susenas 2002,2005

Kualitas air bersih dapat dilihat dari sumbernya. Sumber air minum menurut derajat kualitasnya berturut-turut adalah leding, pompa, sumur (sumur terlindung dan sumur tak terlindung), mata air (mata air terlindung, dan mata air tak terlindung), air sungai dan lainnya.

Untuk rumahtangga yang menggunakan sumber air minum dari pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung harus memperhatikan jaraknya, dari tempat pembuangan akhir tinja. Jarak yang terbaik adalah diatas 6 meter dari tempat pembuangan tinja.

Secara umum sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumahtangga di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 adalah bersumber dari Sumur yaitu sekitar 58,24 persen, sedangkan penggunaan Leding sekitar 10,53 persen, dan sumber air minum dari Pompa sekitar 21,12 persen.

Dilihat dari perkembangannya tampak bahwa kualitas sumber air minum rumah tangga sedikit naik, dimana kualitas sumber air minum yang paling tinggi yang berasal dari leding persentasenya naik dari sekitar 9,73 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 10,53 persen pada tahun 2005. Namun disisi lain terjadi penurunan yang cukup berarti pada rumahtangga yang menggunakan sumber air minum dari sumur yaitu dari sekitar 63,30 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 58,24 persen pada tahun 2005. Sementara rumahtangga yang sumber air minumannya dari air sungai pada tahun 2002 sekitar 4,44 persen, pada tahun 2005 menurun menjadi sekitar 0,16 persen.

7.2.2. Sumber Penerangan

Tabel 7.2.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Tahun 2002 dan 2004

Sumber Penerangan	2002	2004
(1)	(2)	(4)
- Listrik PLN	87,17	85,39
- Listrik Non PLN	-	2,95
- Petromak/Aladin	0,34	4,50
- Pelita/Sentir/Obor	12,31	7,01
- Lainnya	0,17	0,16

Sumber : Susenas 2002,2004

Indikator lain yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah penggunaan sumber penerangan. Sumber penerangan dari listrik dianggap memiliki nilai yang paling tinggi karena selain berfungsi sebagai lampu penerangan juga untuk

kebutuhan operasional peralatan rumah tangga, seperti : televisi, radio, alat masak dan lainnya.

Berdasarkan data Susenas, banyaknya rumahtangga yang menggunakan sumber penerangan listrik (PLN dan non PLN) menunjukkan penurunan dari sekitar 87,17 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 85,39 persen pada tahun 2004. Begitu pula untuk sumber penerangan pelita/sentir/obor juga mengalami penurunan

dari sekitar 12,31 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 7,01 persen pada tahun 2004.

7.2.3. Tempat Pembuangan Tinja

Tabel 7.2.3. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Kloset Tahun 2001 dan 2004

Jenis Kloset	Tahun	
	2001	2004
(1)	(2)	(3)
- Leher Angsa	77,21	81,72
- Plengsengan	16,83	15,03
- Cemplung/cubluk	3,05	2,64
- Tidak pakai	2,91	0,61

Sumber : Susenas 2001,2004

Fasilitas tempat buang air besar yang digunakan juga erat kaitannya dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tempat buang air besar yang sehat dapat dilihat dari kualitas tempatnya dan penampungan akhir tinja yang digunakan, tempat

buang air besar yang memenuhi standar kesehatan adalah kakus dengan jenis leher angsa. Kakus jenis ini adalah yang dibawah tempat duduknya terdapat saluran berbentuk U dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Dari hasil Susenas 2004, secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan jenis kloset leher angsa sebagai tempat buang air besar yaitu sekitar 81,72 persen. Jika dibanding tahun 2001 terjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan, dimana rumahtangga yang menggunakan tempat buang air besar yang memenuhi standar kesehatan meningkat dari sekitar 77,21 persen pada tahun 2001 menjadi sekitar 81,72 persen pada tahun 2004.

Tempat penampungan akhir sangat penting pula bagi kesehatan lingkungan. Susenas memberikan kriteria mengenai penampungan akhir tinja yaitu : tangki/SPAL, kolam/sawah, sungai/danau/laut, lobang tanah, pantai/tanah

lapang/kebun dan lainnya. Pada tahun 2004 sekitar 67,23 persen rumahtangga yang menggunakan tangki sebagai tempat penampungan akhir tinja.

Tabel 7.2.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Tinja Tahun 2001 dan 2004

Tempat Penampungan Akhir Tinja	2001	2004
(1)	(2)	(3)
- Tangki/SPAL	51,77	67,23
- Kolam/Sawah	0,96	0,47
- Sungai/Danau/Laut	15,21	7,15
- Lobang Tanah	20,52	9,31
- Pantai/Tanah lapang/Kebun	5,11	12,88
- Lainnya	6,42	2,96

Sumber : Susenas 2001,2004

Jika dilihat dari perkembangan banyaknya rumah tangga yang menggunakan tempat penampungan akhir tinja, terjadi peningkatan pada penggunaan Tangki yaitu dari sekitar 51,77 persen pada tahun 2001 menjadi sekitar 67,23 persen pada

tahun 2004.

7.3. Status Kepemilikan Rumah

Tabel 7.3. Persentase Rumahtangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tahun 2002 dan 2005

Status Kepemilikan Rumah	2002	2005
(1)	(2)	(3)
- Milik sendiri	89,39	88,18
- Kontrak/sewa	2,04	3,05
- Dinas	1,05	2,65
- Lainnya	7,53	6,12

Sumber : Susenas 2002,2005

Status kepemilikan rumah menurut data susenas dikelompokkan menjadi empat macam yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, dinas dan lainnya. Status kepemilikan rumah milik sendiri mengalami penurunan dari sekitar 89,39 persen pada tahun

2002 menjadi sekitar 88,18 persen pada tahun 2005. Begitu juga dengan lainnya mengalami penurunan dari sekitar 7,53 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar

6,12 persen pada tahun 2005. Sedangkan status kepemilikan rumah kontrak/sewa dan dinas menunjukkan adanya peningkatan yaitu untuk rumah kontrak/sewa dari sekitar 2,04 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 3,05 pada tahun 2005 dan untuk status dinas dari sekitar 1,05 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 2,65 persen pada tahun 2005.

<http://pinrangkab.bps.go.id>

BAB VIII

LAIN-LAIN

8.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan

Data pengeluaran konsumsi makanan per bulan tahun 2005 menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran terbesar penduduk Kabupaten Pinrang pada golongan 80.000-99.999 rupiah yaitu sekitar 25,91 persen. Sedangkan kalau dikelompokkan menurut pengeluaran dibawah 100.000 rupiah dan di atasnya, maka sekitar 2,46 persen penduduk mempunyai pengeluaran diatas 100.000 rupiah dan sekitar 97,54 persen penduduk mempunyai pengeluaran dibawah 100.000 rupiah..

Tabel 8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Menurut Jenisnya Tahun 2001 dan 2005

Golongan Pengeluaran per bulan	2001		2005	
	Makanan	Non Makanan	Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 20.000	-	11,26	11,52	69,60
20.000-29.999	-	29,88	27,13	13,84
30.000-39.999	1,14	20,73	25,21	4,41
40.000-59.999	14,06	21,68	25,91	6,60
60.000-79.999	30,50	7,47	5,60	2,36
80.000-99.999	26,31	3,16	2,16	2,41
100.000-149.999	21,95	2,53	1,29	0,25
150.000-199.999	5,09	1,37	0,85	0,46
200.000-299.999	0,83	0,44	0,32	0,07
300.000 +	0,14	1,48	-	-

Sumber : Susenas 2001,2005

Untuk pengeluaran konsumsi non makanan, pada tahun 2005 menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran terbesar pada golongan < 20.000 rupiah yaitu sekitar

69,60 persen. Jika dikelompokkan menurut pengeluaran dibawah 100.000 rupiah dan diatasnya, maka sekitar 0,70 persen penduduk pengeluarannya diatas 100.000 rupiah dan sekitar 99,30 persen dibawah 100.000 rupiah.

Kalau kita amati perbedaan pengeluaran pada kedua golongan pengeluaran tersebut (makanan dan non makanan), menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat digunakan untuk keperluan konsumsi makanan dan sebagian kecil digunakan untuk konsumsi non makanan. Masih relatif kecilnya pengeluaran konsumsi non makanan merupakan gambaran kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi yang relatif masih rendah.

Jika dilihat perkembangannya, menunjukkan adanya penurunan pada pengeluaran makanan diatas 100.000 rupiah yaitu sekitar 28,01 persen pada tahun 2001 menjadi sekitar 2,46 persen pada tahun 2005. Begitu pula untuk pengeluaran non makanan menunjukkan adanya penurunan dari sekitar 5,82 persen pada tahun 2001 menjadi sekitar 0,78 persen pada tahun 2005.

8.2. Penduduk Miskin

Tabel 8.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pinrang Tahun 2000, 2002 dan 2005

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2000	45,8	14,80
2002	33,0	10,56
2005	23,53	9,99

Sumber : Diolah dari Susenas KOR

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, khususnya di Kabupaten Pinrang telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2000 perbaikan

ekonomi dan situasi politik yang sedikit membaik telah mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Keadaan ekonomi di Kabupaten Pinrang juga semakin membaik

hingga tahun 2005. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya persentase penduduk miskin yaitu sekitar 14,80 persen pada tahun 2000 menjadi sekitar 10,56 persen pada tahun 2002 dan sekitar 9,99 persen pada tahun 2005.

<http://pinrangkab.bps.go.id>